

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Cahyadi, Zainal Muttaqin, dan Anindya, *Hukum Pengawasan*. Kab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2023.

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 1993.

Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Randy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pres, 2022.

Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*. Bandung: CV Bandar Maju, 2008.

Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*. Bandung: Tarsito, 1976.

JURNAL

Anwar, Iryana. “Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan.” *JIHK*, Volume 1, Nomor 1 (2016): 54. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.15>

Annisa, S. (2022). “Politik Hukum Penyatuan Kelembagaan Litbang Jirap Dan Implikasinya Bagi Kelembagaan Dan Penataan SDM.” *Constitution Journal*, 1(2), 137. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.28>

Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2 (2012): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>

Cora Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 2 (2013), . 4. <https://doi.org/10.31078/jk1027>

DM, A. M. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 36. <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/449>

- Delviana, V. (2024). *Persepsi Masyarakat Atas Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Atas Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Kristen Duta Wacana. <http://repository.ukdw.ac.id/id/eprint/8208>
- Felencia, Naomi Catherine. "Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP." *Law, Development & Justice Review*, Volume 5, Nomor 2 (2022): 218. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17214>
- Firdaus, F. R., & Anggono, B. D. (2019). "Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi KTP Elektornik." *Lentera Hukum*, 6, 163. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9545>
- Gaol, D. N. L. "Badan Pengkajian Ideologi Pancasila dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 1(2), . 4.
- Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). "Auditor internal sebagai 'dokter' fraud di pemerintah daerah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 107. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/viewFile/358/419>
- Gunawan, M. S., Jayadi H., & Basniwati, A. D., "Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Diskresi*, Volume 2, Nomor 1 (2023): 23. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/2824>
- Gusman, E. (2019). "Kedudukan BPKP Dalam Mengaudit Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR: 31/PUU-X/2012." *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 348. <https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.390>

- Habibi, D., & Hermawan, I. A. (2020). "Perluasan Kewenangan BPK Dalam Mengawasi Keuangan Negara Di Lingkup Pemerintahan Daerah." *Veritas et Justitia*, 6(2), 324. <https://jdih.dprd.bandung.go.id/artikel/detail/856>
- Hakim, Ifham. "Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Acitya Ardana*, Volume 2, Nomor 1 (2022): 29. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1341>
- Hernadianto, Nour Ardiansyah Hernadi, dan Ifka Saputra. "Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu." *Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Volume 10, Nomor 2 (2020): 263. <https://doi.org/10.32528/jsmbi.v10i2.4125>
- Irawan, M. D. A., & Khodijah, S. (2021). "Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor." *Rechtenstudent*, 2(3), 278. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.87>
- Muhammad Imron Rosyadi, (2016), "Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara". *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2206>
- Naomi Catherine Felencia, (2022) "Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP," *Law, Development & Justice Review*, Volume 5, Nomor 2, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17214>

Rayhan, Ahmad, and Qotrun Nida. (2021), "Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11373>

Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini Terttiaavini. (2022), "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Volume 7, Nomor 1, <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.